

Pengauditan dan Kepengawasan Koperasi*

oleh
Mahendra Adhi Nugroho

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selain pengertian tersebut, pada prinsipnya pengawasan dapat dijalankan apabila ada rencana tertentu, ada perintah untuk mengerjakan, dan ada wewenang kepada orang lain.

Selain prinsip tersebut, juga terdapat prinsip pendukung seperti

1. Pengawasan harus ekonomis
2. Pengawasan harus fleksibel dan mudah dimengerti
3. Pengawasan harus dapat menjamin diadakannya tindakan korektif
4. Pengawasan harus dapat melaporkan penyimpangan yang mungkin ada dan usaha perbaikan
5. Pengawasan harus mengetahui dengan pasti tentang sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.

Agar yang direncanakan dapat diwujudkan dalam kenyataan, seorang pemimpin harus:

1. Memiliki standar sebagai pedoman (alat ukur)
2. Mengadakan supervisi kegiatan
3. Membandingkan hasil-hasil dengan standarnya (mengevaluasi)
4. Melakukan kegiatan perbaikan bila perlu

Personalia pengawasan dalam koperasi

1. Pengawas

Fungsi pengawasan berada di tangan pengawas yang bertindak untuk dan/ atas nama anggota. Secara periodik, pengawas mengadakan pertemuan untuk membicarakan tata pelaksanaan kerja pengurus dalam menjalankan amanat para anggota.

2. Departemen Koperasi Dekopin dan Pusat Koperasi

Pengawas ini termasuk pengawas eksternal yaitu adalah pengawas yang berasal dari luar organisasi bersangkutan, baik dari organisasi pengawasan fungsional maupun non fungsional.

Pelaksanaan pengawasan eksternal pada koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pusat koperasi atau koperasi sekunder secara terus-menerus mengadakan peninjauan yang bersifat pembinaan dan pengawasan

Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil setempat, yang secara aktif melakukan peninjauan ke masing-masing koperasi dalam rangka pembinaan dan pemberian informasi rutin dari pemerintah

3. Badan Penasehat dan Dewan Pembina

Dewan pembina dan penasehat sesuai dengan fungsinya hanya memberi pembinaan serta nasihat pada pengurus dan pengawas. Mereka ini biasanya sosok yang dituakan atau secara struktural lebih dihormati sehingga tepat untuk dimintai saran, nasihat, dan petunjuk. Di sini secara tidak langsung berarti juga bertindak sebagai pengawas asal mereka menyadari dan mempunyai fungsi tersebut serta mau dan mampu melaksanakannya.

4. Manajer

Manajer adalah pengawas operasional, yaitu fungsi yang melekat pada jabatannya karena mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab manajer mencakup semua bidang usaha atau koperasinya sehingga seluruh karyawan koperasi menjadi bawahannya. Hal ini berarti manajer menjadi pengawas atas segala kerja para karyawan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan sehari-hari.

5. Anggota

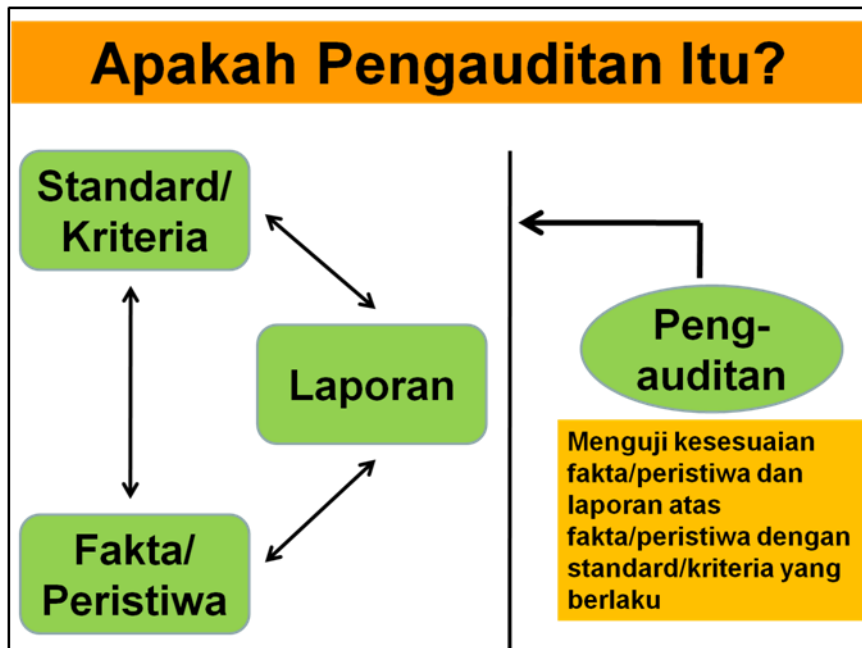
Berdasarkan pada pasal 20 undang-undang No.25 tahun 1992, ayat 2d, yang menyatakan bahwa anggota berhak mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus, baik diminta maupun tidak. Dengan demikian, seandainya seorang anggota melihat ketidakberesan dalam pelaksanaan koperasi, dia secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada pengurus, pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pembina, atau ke kantor koperasi.

6. Akuntan Publik

Koperasi Jasa Audit (KJA) dan akuntan publik merupakan pengawas keuangan yang professional. Namun sampai sekarang masih banyak koperasi yang tidak memanfaatkan layanan jasa akuntan publik sebagai pengawas. Hal ini disebabkan karena belum dirasa perlu dan juga banyak koperasi yang tidak mampu untuk membayar jasa pemeriksaan akuntan.

Konsep Dasar Penagauditan

Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan



Jenis-Jenis Pengauditan

Jenis Pengauditan	Objek Pengauditan	Kriteria	Sifat Laporan
Laporan Keuangan	Data Laporan Keuangan	PABU/GAAP	Opini atas kewajaran laporan
Kepatuhan	Kandungan atau data yang terkait dengan kebijakan, hukum, aturan dsb.	Kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan fihak ketiga	Ringkasan temuan atau pernyataan tentang tingkat kepatuhan
Operasional	Data operational atau data Kinerja	Perangkat tujuan manajemen atau aturan perundangan	Observasi efisiensi dan efektivitas operasi, rekomendasi untuk peningkatan

Kategori Auditor

1. Auditor independen (Independent Auditors), adalah perorangan atau anggota dari kantor akuntan publik yang memberikan jasa profesional di bidang auditing kepada kliennya.
2. Auditor Internal (Internal Auditors), adalah auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan. Cakupan kerja auditor internal meliputi seluruh tahapan aktivitas perusahaan.
3. Auditor Pemerintah (Government Auditors), adalah auditor yang dipekerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Alasan Pentingnya Pengauditan

Audit sangat penting dilakukan karena adanya *Risiko Informasi*, yaitu kemungkinan informasi yang digunakan untuk menilai risiko bisnis tidak dibuat secara tepat, karena:

1. Informasi diterima dari pihak lain
2. Bias dan motivasi pembuat informasi
3. Volume data
4. Kerumitan transaksi

Cara mengurangi *Risiko Informasi*, yaitu:

1. Pemakai laporan melakukan sendiri verifikasi atas informasi
2. Pemakai membebankan risiko informasi pada manajemen
3. Disediakan laporan keuangan yang telah diaudit

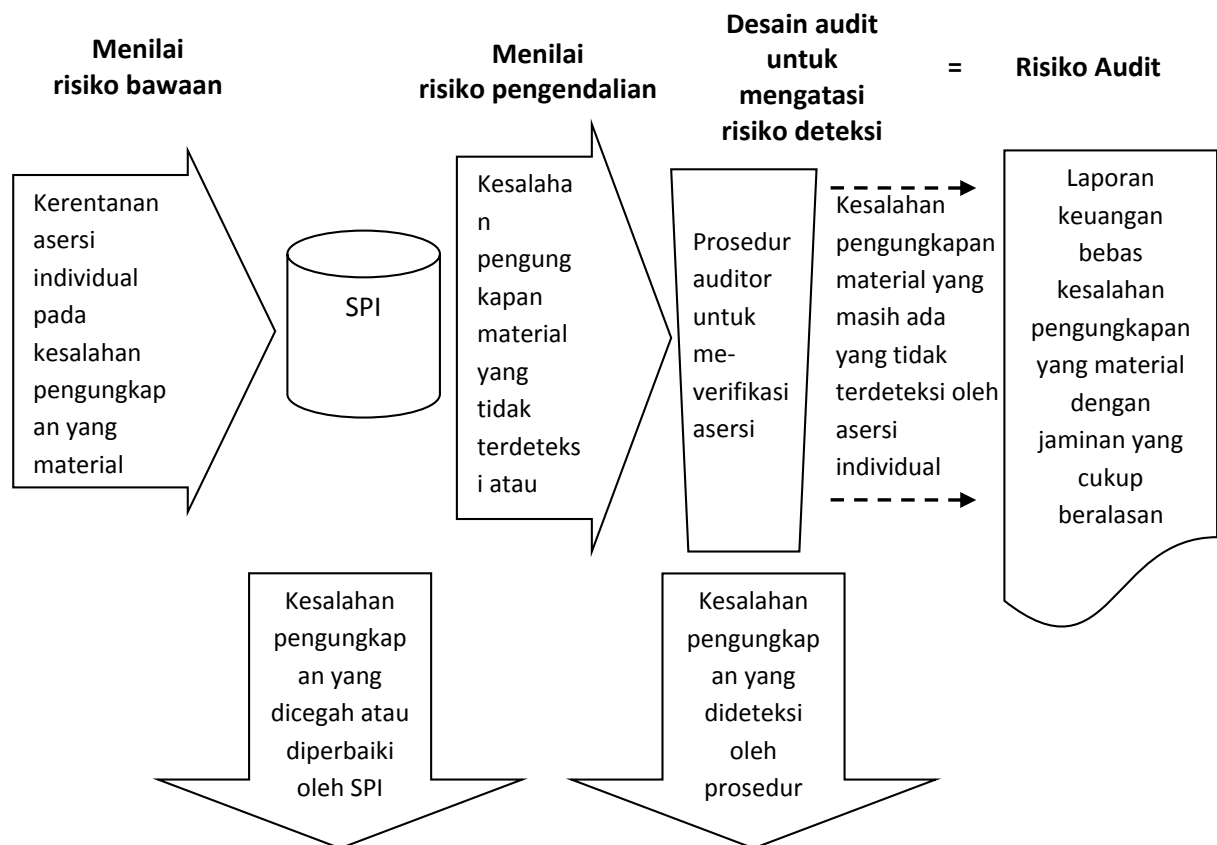
Penentuan Risiko Audit

Risiko audit merupakan risiko yang mungkin terjadi yang dikarenakan kegagalan auditor untuk memberikan opini/rekomendasi yang tepat karena kegagalan mengidentifikasi kesalahan yang cukup material. Secara garis besar risiko audit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi.

Risiko bawaan mengacu pada risiko yang melekat pada proses aktivitas organisasi dan tidak berkaitan dengan pengendalian internal organisasi. Risiko deteksi mengacu pada kegagalan auditor untuk mendeteksi keberadaan salah saji. Risiko pengendalian maupun risiko yang timbul karena adanya kegagalan sistem pengendalian internal organisasi untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan penyajian/pengungkapan. Untuk melakukan penilaian risiko pengendalian sebaiknya auditor melakukan:

1. Mengetahui prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal yang diterapkan pada organisasi.
2. Mengidentifikasi kesalahan dalam penyajian yang potensial
3. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang memungkinkan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan penyajian.
4. Melakukan uji pengendalian untuk mengetahui efektivitas pengendalian
5. Mengevaluasi bukti yang ada untuk melakukan penilaian.

Secara ringkas risiko audit disajikan dalam gambar berikut ini:



Sumber: Boynton, et.al (2001)

Metode Penentuan Sampel

Dalam pelaksanaan pengujian audit auditor dapat menggunakan metode statistik maupun non statistik untuk pemilihan sampel yang harus diuji, atau bahkan menggunakan kedua-duanya. Kedua metode tersebut memerlukan pertimbangan (*judgement*) auditor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasilnya. Perbedaan utama antara kedua metode tersebut bahwa dalam penentuan sampel secara statistik digunakan hukum probabilitas untuk pengendalian risiko sampel. Namun demikian, kedua metode penentuan sampel tersebut dapat memberikan bukti yang memadai sesuai dengan standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Pemilihan di antara kedua metode tersebut terutama didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat. Metode pemilihan sampel non statistik lebih murah daripada metode statistik, namun manfaat metode statistik jauh lebih besar daripada metode non statistik. Penggunaan metode statistik akan bermanfaat bagi auditor dalam:

1. Perancangan suatu sampel yang efisien,
2. Pengukuran cukup tidaknya bukti yang telah diperoleh,
3. Pengevaluasian hasil sampel.

Namun demikian, dalam penentuan sampel secara statistik diperlukan biaya untuk pelatihan staf auditor, perancangan, dan penerapannya yang jumlahnya relatif besar. Pada metode penentuan sampel non statistik, penentuan besaran sampel dan evaluasi hasil-hasilnya didasarkan kriteria yang subjektif dan pengalaman auditor yang bersangkutan, sehingga kemungkinan penggunaan sampel terlalu banyak, atau sebaliknya terlalu sedikit yang tidak

disadari oleh auditor. Namun demikian penggunaan metode non statistik akan se efektif metode statistik bila penggunaannya dirancang secara baik, walaupun statistik mempunyai keuntungan yang tidak dimiliki pada metode non statistik yaitu bahwa auditor dapat mengkuantifikasi dan mengendalikan risiko sampel. Metode penentuan sampel manapun yang digunakan, tidak akan mempengaruhi prosedur audit yang harus diterapkan pada suatu sampel, begitu juga kompetensi bukti yang diperoleh tentang masing-masing unsur sampel atau tanggapan yang tepat oleh auditor atas kesalahan bukti yang ditemukan.

Auditor dapat menggunakan metode penentuan sampel untuk memperoleh informasi tentang berbagai karakteristik dari suatu populasi. Namun demikian, sebagian besar sampel audit digunakan untuk meramalkan: (1) suatu tingkat penyimpangan; (2) suatu jumlah rupiah. Jika teknik statistik digunakan maka masing-masing dinamakan Attribute Sampling dan Variable Sampling. Attribute sampling digunakan untuk pengujian pengendalian dengan tujuan untuk meramalkan tingkat penyimpangan antara pelaksanaan dengan pengendalian yang sudah ditetapkan. Sedangkan variable sampling digunakan untuk pengujian substantif dengan tujuan untuk meramalkan total jumlah rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam suatu populasi.

Pertimbangan Penentuan Sampel

Pertimbangan penentuan jumlah sampel dan pemilihan sampel berkaitan dengan kecukupan bukti yang akan diperoleh dan di gunakan auditor dalam memberikan pertimbangan berupa opini atau rekomendasi terhadap temuan audit. Masalah pertimbangan penentuan sampel jumlah bukti yang dianggap cukup untuk mendukung suatu pernyataan pendapat atau rekomendasi yang diberikan, tergantung pada kebijaksanaan atau pertimbangan auditor yang bersangkutan berdasarkan kemahirannya profesionalnya (*professional judgement*). Dalam menentukan sampel yang akan digunakan auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- Faktor materialitas dan risiko.
- Faktor ekonomis atau efisiensi.
- Banyaknya dan karakteristik populasi.

Faktor materialitas dan risiko. Secara umum auditor akan cenderung menentukan sampel audit berdasarkan materialitas suatu kejadian ekonomi dalam suatu kegiatan. Semakin material suatu kejadian akan menjadi pertimbangan dalam menemukan sampel audit dan besaran jumlah dari sampel itu sendiri.

Sama halnya dengan materialitas, risiko merupakan faktor pertimbangan utama dalam penentuan sampel audit dan pertimbangan besarnya jumlah sampel tersebut. Kejadian ekonomi yang risiko kesalahannya besar (kemungkinan terjadinya penyimpangan besar) memiliki peluang untuk dijadikan sampel audit lebih besar dibandingkan dengan kejadian ekonomi yang risikonya kecil (kemungkinan terjadinya penyimpangan kecil). Di samping risiko yang melekat pada masing-masing akun ada risiko lain yang harus diperhatikan oleh auditor dalam menentukan sampel audit adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian sangat dipengaruhi oleh sistem pengendalian yang diterapkan organisasi. Semakin lemah atau jeleknya sistem

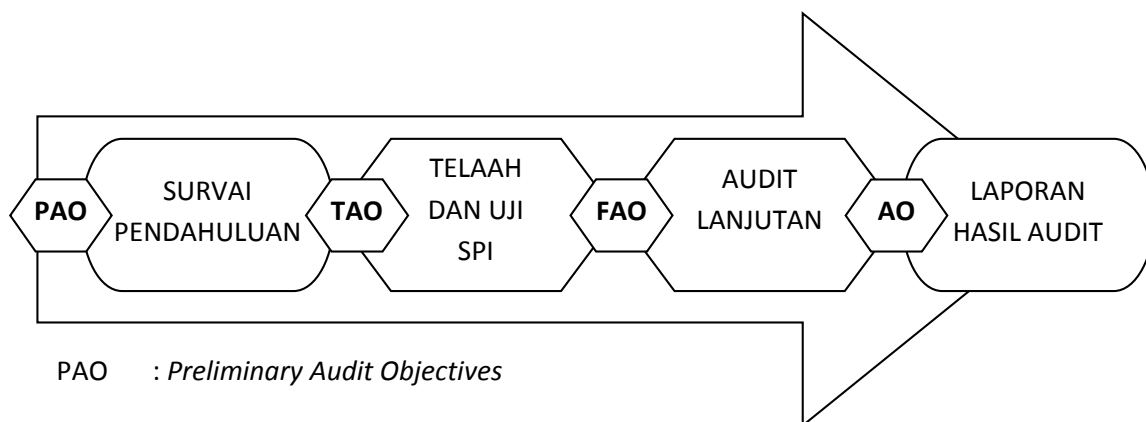
pengendalian maka risiko kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah tinggi sehingga harus dijadikan pertimbangan dalam pemilihan sampel.

Faktor ekonomis atau efisiensi. Auditor dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh waktu dan biaya. Oleh karena itu, dalam menentukan sampel yang harus diambil dan diuji harus memepertimbangkan faktor waktu yang ada sehingga sampel yang di peroleh merupakan sampel yang representatif dan mempunyai kemungkinan untuk diuji untuk memberikan pendapat atau rekomendasi.

Banyaknya dan karakteristik populasi. Banyaknya dan karakteristik populasi mengacu pada banyaknya kejadian ekonomi dan keberagaman jenis kejadian ekonomi yang terjadi. Suatu kegiatan/kejadian ekonomi yang terjadi secara rutin dan homogen mempunyai kecenderungan penyimpangan lebih kecil karena merupakan rutinitas dibandingkan dengan kejadian ekonomi insidental dengan variasi kegiatan dan pembiayaan yang lebih heterogen yang mempunyai penyimpangan lebih besar karena banyaknya jenis dan karakter penganggaran yang beragam.

Pelaksanaan audit

Pelaksanaan proses audit didasarkan pada program kerja audit, menggunakan prosedur dan teknik audit, dan dituangkan kedalam kertas kerja audit. Proses audit dapat digambarkan sebagai berikut:



PAO : Preliminary Audit Objectives

TAO : Tentative Audit Objectives

FAO : Firm Audit Objectives

AO : Audit Objectives

DAFTAR PUSTAKA

- Boyton, et. al, (2001), *Modern Auditing 7th ED*, Jhon Wiley & Sons, inc.
- Jusup, Al. Haryono (2001). *Pengauditan. Buku 1*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Munawir, (1997), *Auditing Modern Buku 1*, BPF, Yogyakarta
- Tim Penyusun, (2011), *Modul Pelatihan Audit Operasional UNY*, Universitas Negeri Yogyakarta

www.ekonomi.web.officelive.com/Documents/BAB%25201%2520PENGAUDITAN.ppt
www.seroja.net/uploaded/taklimat%20asas%20koperasi.ppt

*Disajikan Dalam pendidikan audit untuk tim audit kepengawasan KOPMA UNY pada tahun 2011

Informasi Artikel

Nama Penulis : Mahendra Adhi Nugroho
Judul Artikel : Pengauditan dan Kepengawasan Koperasi
Tanggal upload : 12 Januari 2017
Tahun Publikasi : 2017
Website : <http://mahendra.biz.id>

Cara Sitasi / Menulis di daftar pustaka (APA Stlye) :

Nugroho, M. A. (2017). Pengauditan dan Kepengawasan Koperasi. Retrieved from <http://mahendra.biz.id>.